



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 100 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG  
DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;**
  - b. bahwa untuk menangani pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, Pemerintah perlu berkoordinasi secara terintegrasi untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan persidangan serta menyusun jawaban termohon;**
  - c. bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterangan Presiden dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah;**

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
2. Keterangan Presiden adalah keterangan resmi Pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
3. Kesimpulan Presiden adalah keseluruhan materi dan fakta yang terungkap dalam keseluruhan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang meliputi jawaban atas pertanyaan Hakim, tanggapan terhadap keterangan pihak terkait, dan tanggapan terhadap keterangan ahli dan/atau saksi pemohon.
4. Jawaban Termohon adalah keterangan resmi Pemerintah terhadap permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

5. Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
6. Surat Kuasa Substitusi adalah surat kuasa dari menteri/pejabat setingkat menteri yang menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung kepada pejabat di kementerian/lembaganya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 2

Pemerintah melaksanakan penanganan pengujian:

- a. Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

### BAB II

#### PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.

(2) Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Menteri; dan
  - b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- (3) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi.
- (2) Surat Kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat:
  - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;
  - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau
  - c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

#### Pasal 5

Penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. persiapan persidangan; dan
- b. pelaksanaan persidangan.

### Bagian Kedua Persiapan Persidangan

#### Pasal 6

- (1) Persiapan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan Keterangan Presiden; dan
  - b. pengumpulan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. pengumpulan alat bukti, penentuan saksi dan ahli, dan penentuan juru bicara di persidangan.
- (2) Dalam penyusunan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. judul;
  - b. pembukaan;
  - c. pokok permohonan;
  - d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - e. kedudukan hukum pemohon;
  - f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
  - g. petitum.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Persidangan

#### Pasal 7

Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau penerima Surat Kuasa Substitusi.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan:
  - a. pembacaan Keterangan Presiden;
  - b. pemberian keterangan saksi dan/atau ahli;
  - c. penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden; dan/atau
  - d. pembacaan putusan.

(2) Pembacaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
- (3) Saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadirkan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri.
- (4) Penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri.
- (5) Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi.

### **BAB III**

## **PENANGANAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. Menteri; dan
  - b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam memberikan Jawaban Termohon dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri, menteri, atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus sebagai koordinator.

#### Pasal 10

- (1) Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi.
- (2) Surat Kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat:
  - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;
  - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau
  - c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

#### Pasal 11

Penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa penyusunan Jawaban Termohon.

#### Bagian Kedua Penyusunan Jawaban Termohon

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan.

(2) Jawaban . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. judul;
  - b. pembukaan;
  - c. pokok permohonan;
  - d. kewenangan Mahkamah Agung;
  - e. kedudukan hukum pemohon;
  - f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
  - g. petitum.

#### **BAB IV**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 13**

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau kementerian/lembaga terkait.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 14**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan, Deputy Bidang Hukum  
dan Pengundang-undangan,

